

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. ARAH KEBIJAKAN

Perjalanan pembangunan Propinsi DKI Jakarta mengalami pasang surut yang cukup panjang. Berdasarkan penggalan waktu (periodisasi), perjalanan pembangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Periode 2001, masa penyembuhan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, dengan program utama perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung bergeraknya kembali roda perekonomian Propinsi DKI Jakarta, disebut juga Rescue-Recovery Program.
- b. Periode 2002-2004, masa pemulihan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, penegakkan supremasi hukum dan peningkatan ketertiban umum, dengan program utama perbaikan infrastruktur sosial-ekonomi dan peningkatan pelayanan publik, disebut juga Recovery Program.
- c. Periode 2005-2007, masa pemantapan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM dengan program utama penguatan fundamental sosial dan ekonomi menuju pada kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan, disebut juga Stabilization Program.

Berdasarkan perjalanan pembangunan, fakta dan keadaan, serta permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan masyarakat dalam membangun kotanya, dapat dirumuskan arah dan kebijakan umum pembangunan Propinsi DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Arah Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007

- a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan penegakan hukum dan perbaikan infrastruktur sosial politik dan ekonomi serta pemeliharaan sarana dan prasarana kota.
- b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, menuju kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan.

2. Pokok Kebijakan Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007

- a. Menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum dan budaya hukum
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan, aset dan usaha daerah dalam rangka peningkatan kemandirian daerah
- d. Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan
- e. Mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peranserta usaha mikro, UKM dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya saing produk
- f. Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka wajib belajar 9 tahun, pemerataan pendidikan dan pemerataan layanan kesehatan
- g. Meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat
- h. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik

sosial dan tawuran masa

- i. Meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS, penyalahgunaan narkoba dan tawuran pelajar
- j. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengendalian produksi, pengendalian konsumsi dan pengendalian aktivitas yang kurang ramah lingkungan
- k. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan daya dukung kota

4.2. STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pembangunan Propinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Strategi disusun berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal daerah. Strategi sebagai pendekatan dasar akan mampu mendongkrak perubahan pemerintahan secara bermakna. Karena itu, pilihan strategi yang tepat dalam membangun Propinsi DKI Jakarta menjadi sangat penting. Dalam kaitan ini, digunakan 2 (dua) pendekatan implementasi sebagai “titik angkat” pembangunan Propinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Pendekatan partisipatif : Mewujudkan masyarakat kota yang mandiri dan sejahtera melalui proses pemberdayaan, dengan mengedepankan prinsip demokratisasi, kesetaraan dan keberpihakan pada masyarakat.
2. Pendekatan komprehensif, yaitu membentuk struktur ruang kota yang strategis sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah/kawasan, secara berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kedua pendekatan tersebut diimplementasikan secara sinergis, terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan.

Strategi merupakan alat penghubung antara Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan dalam satu paket dengan strategi di setiap bidang pembangunan. Strategi di setiap bidang Renstrada Propinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam setiap bab dari bab 5 hingga bab 12 yang

mencerminkan delapan bidang Renstrada Propinsi DKI Jakarta. Strategi dilahirkan dari pengamatan setiap bidang sehingga secara umum bersifat memayungi strategi di setiap bidang pembangunan Propinsi DKI Jakarta. Strategi tersebut meliputi :

1. Menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas individu aparat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peraturan, membangun mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian, keharmonisan kehidupan hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman, tertib dan tenteram. (HUKUM dan TRAMTIB)
2. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian, struktur organisasi, dan administrasi pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance* untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. (PEMERINTAHAN)
3. Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan, dan pemanfaatan keuangan daerah yang digunakan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab yang tercipta melalui sistem pengawasan keuangan yang ketat. (PEMERINTAHAN)
4. Mengembangkan sistem *database* yang bersifat informatif, aktual, dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mencapai terciptanya pembangunan yang berbasis pada profesionalisme, terstruktur, sistematis dan akuntabel. (PEMERINTAHAN)
5. Menciptakan pemerataan pendidikan dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya, terutama pada program pendidikan 9 tahun dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana fisik/non fisik

- pendidikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta. (PENDIDIKAN)
6. Mengatasi permasalahan sosial seperti penggunaan narkoba, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya yang berpotensi mengganggu jalannya proses belajar mengajar. (PENDIDIKAN-SOSIAL)
 7. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan dan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kesehatan, agar setidaknya mencapai standar minimum pelayanan kesehatan. (KESEHATAN)
 8. Mengembalikan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi Propinsi DKI Jakarta dengan mengembangkan kebijakan yang pro pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan *high cost economy* dan menciptakan sistem pelayanan investasi yang simpel untuk mencapai terciptanya peningkatan investasi di Propinsi DKI Jakarta. (EKONOMI)
 9. Mengembangkan usaha-usaha pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. (EKONOMI-TENAGA KERJA)
 10. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektor-sektor yang non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja. (EKONOMI-LINGKUNGAN HIDUP-TENAGA KERJA)
 11. Membangun komunikasi antar masyarakat Propinsi DKI Jakarta yang bersifat heterogen dengan memperhatikan akar budaya masing-masing daerah sehingga seminimal mungkin dapat menekan terjadinya konflik-konflik horizontal. (SOSIAL)

12. Memantapkan arah dan tujuan pembangunan sosial dengan mengoptimalkan peranan pemerintah, swasta dan dukungan masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan moral pemerintah dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. (SOSIAL-AKHLAK)
13. Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan penduduk serta mengendalikan arus perpindahan penduduk ke DKI Jakarta seperti urbanisasi. (SOSIAL-KEPENDUDUKAN)
14. Meminimalisir dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap daya dukung lingkungan dan sumber daya alam. (SARANA-PRASARANA-LINGKUNGAN HIDUP)
15. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan seperti kemacetan, banjir, pemukiman kumuh, ledakan pedagang kaki lima dan lain-lain. (SARANA-PRASARANA-SOSIAL)

4.3. INDIKATOR KINERJA UNTUK STRATEGI

Strategi digunakan oleh pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun masa kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan arah kebijakan pembangunan. Kinerja pemerintah daerah dapat dievaluasi dari keberhasilan pemerintah untuk menerapkan strategi, sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan strategi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa

1. Tegaknya supremasi hukum di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat ibu kota akan aturan-aturan dalam hukum.
3. Terwujudnya keharmonisan hidup di masyarakat, sehingga tercipta rasa aman, tertib dan tenteram, serta menguatnya rasa kebangsaan.
4. Meningkatnya kualitas moral dan mentalitas aparaturnya penegak hukum Pemda Propinsi DKI Jakarta.

Bidang Pemerintahan

1. Terciptanya sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance*.
2. Terwujudnya sistem pemerintahan yang efisien, efektif, dan profesional dengan dukungan sistem keuangan daerah dan sistem informasi yang lebih handal.

Bidang Ekonomi

1. Meningkatnya kepercayaan dunia usaha baik domestik maupun internasional terhadap iklim berinvestasi di wilayah Propinsi DKI Jakarta.
2. Tercapainya pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat.
3. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja, dalam menghadapi persaingan global dan memerangi kemiskinan.
4. Menurunnya angka pengangguran.
5. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.

Bidang Pendidikan dan Kesehatan

1. Tercapainya pemerataan di bidang pendidikan untuk semua warga kota.
2. Menurunnya jumlah persoalan sosial di kalangan pelajar seperti jumlah pemakai narkoba dan jumlah perkelahian pelajar.
3. Terciptanya kualitas pendidikan yang mampu menghasilkan SDM yang profesional.
4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan dukungan layanan kesehatan yang bermutu.
5. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Tersedianya data dasar kependudukan yang akurat dan dinamis yang didukung oleh teknologi.
2. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.
3. Semakin ter kendalinya jumlah penduduk Propinsi DKI Jakarta.
4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

Bidang Sosial dan Budaya

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak, yang bermoral dan sarat dengan nilai-nilai keagamaan, berbudaya, berdisiplin dan produktif.
2. Terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tenang, damai dan terhindar dari segala jenis konflik horisontal antar warga kota.
3. Terwujudnya masyarakat yang memiliki kecintaan dan komitmen dalam membangun kotanya.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Ter kendalinya pemanfaatan air tanah.
2. Ter kendalinya dampak pencemaran udara.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau.
4. Terciptanya keseimbangan lingkungan perkotaan yang teduh, nyaman, sehat dan manusiawi.

Bidang Sarana dan Prasarana Kota

1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang mendukung lingkungan dan sumber daya alam
2. Menurunnya jenis dan jumlah permasalahan akibat rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana seperti masalah kemacetan, banjir, pemukiman kumuh.